

SKRIPSI

**PENGARUH PERKEMBANGAN PERKOTAAN TERHADAP MORFOLOGI
PUSAT KOTA (STUDI KASUS: KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)**

Disusun dan diajukan oleh

M. IMAM FIRDAUS ANWAR

D52115017



**DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)
PENGARUH PERKEMBANGAN PERKOTAAN TERHADAP
MORFOLOGI PUSAT KOTA (STUDI KASUS: KECAMATAN UJUNG
KOTA PAREPARE)

Disusun dan diajukan oleh

M. IMAM FIRDAUS ANWAR

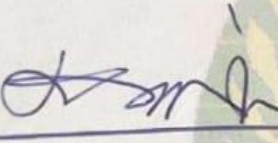
D52115017

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan
Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
pada tanggal 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

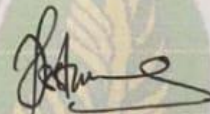
Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT
NIP. 19630504 199512 1 001



Isfa Sastrawati, ST., MT
NIP. 19741220 200501 2 001

Ketua Program Studi,
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin



Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si.
NIP. 19741006 2008 12 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Imam Firdaus Anwar
NIM : D52115017
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

PENGARUH PERKEMBANGAN PERKOTAAN TERHADAP MORFOLOGI PUSAT KOTA (STUDI KASUS: KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)

adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2022

Yang Menyatakan


(M. Imam Firdaus Anwar)

PENGARUH PERKEMBANGAN PERKOTAAN TERHADAP MORFOLOGI PUSAT KOTA (STUDI KASUS: KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE)

M. Imam Firdaus Anwar ¹⁾, Arifuddin Akil ²⁾, Isfa Sastrawati ³⁾

¹⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: imamfirdaus000@gmail.com

²⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: arifuddinak@yahoo.co.id

³⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: sastra.isfa@gmail.com

ABSTRAK

Kota Parepare merupakan salah satu kota pelabuhan yang berada di Sulawesi Selatan. Selain posisinya yang strategis sebagai kota pelabuhan, luas wilayah Kota Parepare juga terbilang kecil sehingga perkembangan Kota Parepare dapat berlangsung dengan cepat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031, disebutkan bahwa Kecamatan Ujung sebagai pusat Kota Parepare. Sebagai pusat kota, perkembangan Kecamatan Ujung sangat terkait satu sama lain dengan perkembangan Kota Parepare itu sendiri. Belum lagi, mengingat Kota Parepare yang merupakan kota bekas Kolonial, sehingga ketika penduduk Belanda meninggalkan Kota Parepare, perubahan perkotaan dapat sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kota. Untuk menghindari adanya cacat dalam morfologis kota, penting dilakukan penelusuran sejarah pembentukan morfologi Kecamatan Ujung sebagai proses belajar dari keberhasilan dan kegagalan masa lampau. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan perkotaan, mengidentifikasi morfologi Kecamatan Ujung serta pengaruh perkembangan perkotaan terhadap morfologi Kecamatan Ujung. Metode analisis yang digunakan adalah dengan membandingkan penataan Kota Parepare dan Kecamatan Ujung pada periode Kolonial dan modern, guna mengidentifikasi perubahan yang terjadi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Kota Parepare berkembang dengan mengisi lahan-lahan kosong ke arah timur, selatan, dan timur laut kota, yang mulai mengisi kawasan tengah kota. Pertumbuhan bangunan terjadi dengan mengikuti jaringan jalan yang ada dan mulai membentuk pusat-pusat kegiatan baru di beberapa kawasan. Kecamatan Ujung memiliki morfologi berpola inti atau kompak yang berpusat pada kawasan pesisir di Kelurahan Ujung Sabbang yang memiliki fungsi pemerintahan, pelabuhan, olahraga, dan perdagangan di sekitarnya. Bentuk inti atau kompak ini telah terbentuk sejak periode Kolonial Belanda pada kawasan-kawasan perkantoran dan permukiman awal penduduk Belanda. Pertumbuhan bangunan sendiri cenderung bersifat interestial pada kawasan permukiman di Kelurahan Labukkang yang mendominasi fungsi lahan Kecamatan Ujung. Adapun aspek perkembangan Kota Parepare yang secara dominan mempengaruhi morfologi Kecamatan Ujung adalah aspek non-fisik. Adapun aspek yang secara dominan mempengaruhinya adalah aspek politik perkembangan Kota Parepare.

Kata Kunci: Perkembangan Kota, Morfologi Kota, Kecamatan Ujung

THE EFFECT OF URBAN DEVELOPMENT ON THE MORPHOLOGY OF THE CENTER OF THE CITY (CASE STUDY UNJUNG SUBDISTRICT OF PAREPARE CITY)

M. Imam Firdaus Anwar ¹⁾, Arifuddin Akil ²⁾, Isfa Sastrawati ³⁾

¹⁾ Department of Urban and Regional Planning, Engineering Faculty of Hasanuddin University. Email: imamfirdaus000@gmail.com

²⁾ Department of Urban and Regional Planning, Engineering Faculty of Hasanuddin University. Email: arifuddinak@yahoo.co.id

³⁾ Department of Urban and Regional Planning, Engineering Faculty of Hasanuddin University. Email: sastra.isfa@gmail.com

ABSTRACT

Parepare City is one of the port cities in South Sulawesi. In addition to its strategic position as a port city, the area of Parepare City is also relatively small so that the development of Parepare City can take place quickly. Based on Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning the Spatial Planning of the City of Parepare in 2011-2031, it is stated that Ujung Subdistrict is the center of Parepare City. As a city center, the development of Ujung Subdistrict is closely related to the development of Parepare City itself. Not to mention, considering the City of Parepare which is a former colonial city, so that when the Dutch population left the City of Parepare, urban changes could be fully carried out by the city government. To avoid any defects in the morphology of the city, it is important to trace the history of the morphology formation of Ujung District as a learning process from past successes and failures. The research aims to identify urban development, identify the morphology of Ujung District and the influence of urban development on the morphology of Ujung District. The analytical method used is to compare the arrangement of Parepare City and Ujung District in the colonial and modern periods, in order to identify the changes that occurred. The results of the study indicate that the development of Parepare City is growing by filling vacant lands to the east, south, and northeast of the city, which begins to fill the downtown area. The growth of buildings occurred by following the existing road network and starting to form new activity centers in several areas. Ujung Subdistrict has a core or compact morphology pattern centered on the coastal area in Ujung Sabbang Village that has the functions of government, port, sports, and trade in the vicinity. This core or compact form has been formed since the Dutch Colonial period in office areas and early settlements of the Dutch population. The growth of the building itself tends to be interested in the residential area in the Labukkang Village which dominates the land function of the Ujung District. The development aspect of Parepare City that dominantly affects the morphology of Ujung District is the non-physical aspect. The aspect that dominantly influences it is the political aspect of the development of the City of Parepare.

Key Words: *City Development, City Morphology, Ujung Subdistrict*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan “Tugas Akhir” ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*. Salam serta shalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa lentera ilmu kepada ummat manusia.

Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata 1 (S1) di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Tugas Akhir ini, berisikan mengenai hasil penelitian penulis yang dituai dalam bentuk laporan tugas akhir. Adapun judul dari tugas akhir ini yaitu “Pengaruh Perkembangan Perkotaan Terhadap Morfologi Pusat Kota (Studi Kasus: Kecamatan Ujung Kota Parepare)”.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis melalui begitu banyak tantangan dan kendala, namun atas kasih serta berkat dari Allah Swt penulis juga mendapat banyak pengalaman serta pembelajaran melalui bimbingan dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Untuk itu, saran serta kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis agar ke depan bisa lebih baik lagi. Penulis berharap penulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian. Selain itu penulis berharap tugas akhir ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh para akademisi. Akhir kata, tidak ada kata pantang menyerah jika sudah memilih untuk memulai, barang siapa yang bersungguh-sungguh niscaya akan berhasil. Jangan berhenti mencoba, segala sesuatu memang tidak mudah dilalui tapi jika kita percaya bahwa kita bisa, maka kita benar-benar bisa melakukannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, 20 Januari 2022

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahillobbil' alamiin. Segala puji dan syukur atas kehadiran *Allah Subhanuhu wa taala* yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuk-Nya berupa kekuatan, kesehatan, kesempatan, keimanan, kesabaran, dan juga ilmu pengetahuan. Tak lupa pula salam serta shalawat senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar *Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam* yang menjadi pembawa lentera ilmu kepada seluruh ummat manusia.

Dalam masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini, begitu banyak pihak yang berperan penting dan memberi bantuan, doa, serta dukungan dengan tulus ikhlas kepada penulis. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis hanturkan kepada:

1. Kepada orang tua penulis. Ayahanda Ancong S.Pd. dan Ibunda Warni yang telah mendidik penulis dengan sabar dan ikhlas sampai saat ini, serta membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga sehat selalu dan panjang umur untuk kedua orang tua tercinta.
2. Rektor Universitas Hasanuddin (Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si.) atas dukungan dan bantuannya.
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Prof Dr. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT) atas segala dukungan dan kebijakannya.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST.,M.Si selaku Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas teknik Universitas Hasanuddin, yang telah memberi dukungan dan nasehat membangun kepada penulis selama masa perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
5. Sekretaris Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin (Ibu Sri Aliah Ekawati, ST., MT.) atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan.
6. Terima kasih kepada Bapak Mukti Ali, ST., MT., PhD selaku pembimbing akademik yang telah menjadi orang tua bagi penulis di kampus. Terima kasih

atas arahan yang menjadi pedoman bagi penulis dalam menjalankan segala lingkup perkuliahan mulai dari awal hingga proses penyelesaian tugas akhir ini.

7. Kepala Studio (Dr.techn. Yashinta K. D. Sutopo, ST., MIP) sekaligus dosen pembimbing utama penulis yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing Utama yakni Bapak Dr. Ir. Arifuddin Akil, MT. dan Dosen Pembimbing Pendukung yakni Ibu Isfa Sastrawati, ST., MT. yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi orang tua, teman diskusi dan bagian terpenting dalam studi penulis khususnya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Dosen Penguji
10. Terima kasih kepada Ibu Dr. Techn. Yashinta Kumala Dewi Sutopo, ST., MIP selaku Kepala Laboratorium Studio Akhir Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota yang selalu memberi perhatian, nasihat, motivasi, saran, dan bimbingan selama masa perkuliahan studio akhir..
11. Terima kasih kepada seluruh Dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin yang telah memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan, pengalaman, motivasi, semangat, serta nasihat yang begitu berharga bagi penulis.
12. Terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Departemen PWK Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Bapak Haerul Muayyar S.Sos, dan Bapak Syawalli B. yang telah membantu dalam pengurusan kelengkapan administrasi berkas penulis selama proses penyelesaian tugas akhir dan proses berkuliah.
13. Terima kasih kepada HMPWK FT-UH yang telah memberi ruang belajar mengenai dunia organisasi kepada penulis, begitu banyak pengalaman yang telah didapatkan dari setiap kegiatan yang diadakan oleh HMPWK FT-UH.
14. Terima kasih kepada saudara(i) Muhammad Syafi'i, ST., Mursaling, ST., Rizda Adzidzah Fadhilah, ST., dan Asmaul Husna, ST. yang selalu setia mendampingi penulis di berbagai suka maupun duka dalam menjalani masa perkuliahan.

15. Terima kasih kepada saudara(i) Muhammad Fajar Z.R., Khairullah, Alif Pratama Putra A., dan Nurfadilla yang telah menemani penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini. Semoga hal-hal baik menyertai kalian.
16. Terima kasih kepada saudara(i) Ichsan Caesar Pratama, ST., Iqbal Kamaruddin, ST., Muhammad Reza Prajana, ST., Muhammad Fadel, ST., Muhammad Arif, ST., Muhammad Firdaus ST., A. Gusti Bangsawan, ST., Brili Gunawan, ST., Ayun Amalaiyah, ST., dan A. nada Zahirah, ST., yang telah membuka pikiran penulis melalui diskusi dalam berbagai hal serta memberikan dukungan moril dan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan skripsi ini, yang tentu sangat berarti bagi penulis.
17. Terima kasih kepada saudara Aspar, ST., dan A. Afif Diaulhaq, ST., yang juga sebagai teman diskusi serta seperjuangan dalam berbagai suka duka selama masa kepengurusan di HMPWK FT-UH.
18. Teruntuk keluarga baru di masa perkuliahan, ZONASI 15. Terima kasih karena sudah mentoreh begitu banyak momen bersama, baik itu suka maupun duka. Terima kasih sudah menjadi saudara-saudara yang begitu pengertian dan penuh dengan rasa simpati di saat penulis dalam keadaan susah.
19. Terima kasih kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HMPWK FT-UH) Periode 2018/2019. Terima kasih atas pengalaman berorganisasinya dan terima kasih atas kenangan manis yang tak akan penulis lupakan.
20. Dan terakhir, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan namanya satu per satu, kalian semua telah memberikan banyak bantuan kepada penulis, semoga suatu saat nanti kebaikan-kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang terbaik baik dari Allah Swt. *Aamiin Allahumma Amiin.*

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan khususnya pada bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota. semoga apa yang telah kita kerjakan senantiasa mendapat ridho dari-Nya.

Gowa, 20 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR. PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Konsep Kota.....	7
2.2 Perkembangan Kota dan Struktur Ruang.....	8
2.3 Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Perkembangan Kota.....	13
2.4 Faktor Non-fisik Perkembangan Perkotaan.....	18
2.5 Morfologi.....	28
2.6 Kesimpulan Kajian Pustaka.....	30
2.7 Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35

3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
3.3	Jenis dan Kebutuhan Data.....	37
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5	Teknik Analisis.....	39
3.6	Kerangka Pikir Penelitian.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Gambaran Umum Kota Parepare.....	44
4.1.1	Sejarah Kota Parepare.....	44
4.1.2	Gambaran Fisik Kota Parepare.....	46
4.1.3	Gambaran Non Fisik Kota Parepare.....	61
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Ujung.....	68
4.2.1	Aspek Geografis.....	68
4.2.2	Aspek Demografis.....	70
4.2.3	Pola Penggunaan Lahan Kecamatan Ujung.....	70
4.2.4	Pola Jalan Kecamatan Ujung.....	73
4.2.5	Sebaran dan Fungsi Bangunan Kecamatan Ujung.....	75
4.3	Analisis dan Pembahasan.....	77
4.3.1	Perkembangan Kota Parepare.....	77
4.3.2	Morfologi Kecamatan Ujung.....	102
4.3.3	Pengaruh Perkembangan Kota Parepare Terhadap Morfologi Kecamatan Ujung.....	136
BAB V PENUTUP.....		157
5.1	Kesimpulan.....	157
5.2	Saran dan Rekomendasi.....	159
DAFTAR PUSTAKA.....		160
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....		162

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Dasar Pengetahuan (Base of Knowledge)	31
Tabel 2.2	Variabel Penelitian.....	31
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1	Kebutuhan Data.....	38
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Parepare.....	46
Tabel 4.2	Luas dan Jenis Penggunaan Lahan Kota Parepare Tahun 2010.....	49
Tabel 4.3	Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan Kota Parepare Tahun 2015.....	50
Tabel 4.4	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota Parepare (Km) Tahun 2010-2019.....	55
Tabel 4.5	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Parepare (Km) Tahun 2010 – 2019.....	56
Tabel 4.6	Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan di Kota Parepare (Km) Tahun 2017-2019.....	58
Tabel 4.7	Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Kelas Jalan di Kota Parepare (Km) Tahun 2017 – 2019.....	59
Tabel 4.8	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Parepare Tahun 2010-2020.....	61
Tabel 4.9	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Parepare Tahun 2020.....	63
Tabel 4.10	Pertumbuhan perekonomian Menurut Lapangan Usaha Kota Parepare Tahun 2004 – 2008.....	64
Tabel 4.11	Pertumbuhan Struktur Perekonomian Kota Parepare Tahun 2004–2008.....	65
Tabel 4.12	PDRB Perkapita Kota Parepare Tahun 2004–2008.....	65
Tabel 4.13	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan usaha di Kota Parepare tahun 2016–2020.....	66

Tabel 4.14	Luas, Letak dan Ketinggian Kelurahan Dari Permukaan Laut di Kecamatan Ujung Tahun 2017.....	68
Tabel 4.15	Jumlah Penduduk, Sex ratio, Rumah tangga, dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Ujung Tahun 2017.....	70
Tabel 4.16	Perkembangan Fisik dan Non-fisik Kota Parepare.....	100
Tabel 4.17	Bangunan Peninggalan Periode Kolonial yang Masih Dapat Ditemui Sekarang di Kecamatan Ujung.....	123
Tabel 4.18	Morfologi Kecamatan Ujung Berdasarkan 3 Elemen Morfologi Kota.....	132
Tabel 4.19	Aspek Perkembangan Kota Parepare yang Secara Dominan Mempengaruhi Morfologi Kecamatan Ujung.....	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Ruang Lingkup Wilayah Penelitian.....	5
Gambar 2.1	Alternatif Bentuk Kota	10
Gambar 2.2	Perkembangan Horizontal	11
Gambar 2.3	Perkembangan Vertikal	12
Gambar 2.4	Perkembangan Interstisial	12
Gambar 3.1	Peta Citra Lokasi Penelitian	36
Gambar 3.2	Kerangka Pikir Penelitian.....	43
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kota Parepare Tahun 2019.....	47
Gambar 4.2	Grafik Luas Tiap kecamatan di Kota Parepare.....	48
Gambar 4.3	Grafik Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Parepare Tahun 2015 (Persen).....	49
Gambar 4.4	Grafik Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kota Parepare Tahun 2019 (Persen).....	50
Gambar 4.5	Grafik Luas Baku Lahan Sawah Menurut Penggunaan di Kota Parepare Tahun 2019 (Persen).....	51
Gambar 4.6	Grafik Penggunaan Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Kecamatan di Kota Parepare Tahun 2019 (Ha)	52
Gambar 4.7	Grafik Luas Lahan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan di Kota Parepare Tahun 2019 (Ha).....	53
Gambar 4.8	Peta Penggunaan Lahan Kota Parepare Tahun 2019.....	54
Gambar 4.9	Peta Jaringan Jalan Kota Parepare Tahun 2019	60
Gambar 4.10	Diagram Perkembangan Penduduk Kota Parepare Tahun 2000-2020.....	62
Gambar 4.11	Diagram Distribusi Penduduk Kota Parepare Tahun 2020	63
Gambar 4.12	Peta Administrasi Kecamatan Ujung Kota Parepare Tahun 2018	69
Gambar 4.13	Peta Penggunaan Lahan Kawasan Penelitian Tahun 2019.....	72
Gambar 4.14	Peta Jaringan Jalan Kawasan Penelitian Tahun 2019.....	74
Gambar 4.15	Peta Fungsi Bangunan Kawasan Penelitian Tahun 2019	76

Gambar 4.16	Peta Penggunaan Lahan Kota Parepare Pada Periode Kolonial Belanda (1920-1940)	78
Gambar 4.17	Peta Penggunaan Lahan Kota Parepare Pada Periode Modern (2000-2020)	79
Gambar 4.18	Peta Jaringan jalan Kota Parepare Pada Periode Kolonial Belanda (1920-1940)	84
Gambar 4.19	Peta Jaringan Jalan Kota Parepare Pada Periode Modern (2000-2020)	85
Gambar 4.20	Peta Sebaran Pelayanan Masyarakat di Kota Parepare Tahun 1920-1940.....	88
Gambar 4.21	Peta Sebaran Fasilitas Pelayanan Masyarakat di Kota Parepare Tahun 2000-2020.....	89
Gambar 4.22	Peta Sebaran Fasilitas Ekonomi di Kota Parepare Tahun 1920-1940.....	92
Gambar 4.23	Peta Sebaran Fasilitas Ekonomi di Kota Parepare Tahun 2000-2020.....	93
Gambar 4.24	Proses bongkar muat kopra di Pelabuhan Parepare, 1948.....	94
Gambar 4.25	Peta Sebaran Fasilitas Perkantoran dan Pertahanan Keamanan di Kota Parepare Tahun 1920-1940.....	97
Gambar 4.26	Peta Sebaran Fasilitas Perkantoran dan Pertahanan Keamanan di Kota Parepare Tahun 2000-2020.....	98
Gambar 4.27	Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Ujung Periode 1920-1940	104
Gambar 4.28	Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Ujung Periode 2000-2020	105
Gambar 4.29	Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Ujung.....	108
Gambar 4.30	Peta Pola Jaringan Jalan Kecamatan Ujung Periode 1920-1940	111
Gambar 4.31	Peta Pola Jaringan Jalan Kecamatan Ujung Periode 2000-2020	112
Gambar 4.32	Peta Perubahan Ruas Jalan Kecamatan Ujung Antara Periode 1920-1940 dan 2000-2020	114

Gambar 4.33	Bangunan Bekas Kantor Kontrolir Belanda, Sekarang Kantor AJENREM 142.....	116
Gambar 4.34	Peta Persebaran Bangunan Kecamatan Ujung Periode 1920-1940.....	117
Gambar 4.35	Peta Persebaran Bangunan Kecamatan Ujung Periode 2000-2020.....	118
Gambar 4.36	Sketsa Rumah Tradisional Bugis.....	119
Gambar 4.37	Rumah Tradisional Bugis yang Masih Bertahan Hingga Sekarang	120
Gambar 4.38	Hotel Siswa dan Kawasan Pecinan di Kecamatan Ujung Tahun 1940.....	121
Gambar 4.39	Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Parepare yang dulunya Sekolah China.....	122
Gambar 4.40	Bangunan Tradisional dengan Gaya Arsitektur Modern.....	126
Gambar 4.41	Salah Satu Rumah Tradisional Penduduk di Kecamatan Ujung	127
Gambar 4.42	Bangunan modern dengan fungsi perdagangan dan jasa di Kecamatan Ujung	129
Gambar 4.43	(kiri) Bangunan modern di kawasan permukiman, (kanan) bentuk bangunan modern di kawasan perdagangan di Kecamatan Ujung.....	130
Gambar 4.44	Peta Perubahan Penggunaan Lahan dan Aspek Penyebabnya di Kecamatan Ujung.....	137
Gambar 4.45	Peta Sebaran Permukiman Awal Penduduk Pribumi di Kecamatan Ujung	138
Gambar 4.46	Kebijakan Pemerintah Kota terhadap Penggunaan Lahan Kecamatan Ujung	142
Gambar 4.47	Peta Perubahan Jaringan Jalan dan Aspek Penyebabnya di Kecamatan Ujung	144
Gambar 4.48	Bentuk bangunan pribumi yang mengadopsi bentuk bangunan modern. (kiri) Bangunan dengan pelindung (kanopi), (kanan) Bangunan tanpa pelindung	146

Gambar 4.49	Peta Perubahan Bentuk Bangunan dan Aspek Penyebabnya di Kecamatan Ujung.....	147
Gambar 4.50	(kiri) AJENREM 142 bangunan bekas Kantor Kontrolir Belanda (kanan) Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Parepare bangunan bekas Sekolah China.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah). Ada banyak ahli yang memiliki argumen berbeda terkait pengertian sebuah kota, namun pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan aspek. Beberapa argumen terkait definisi sebuah kota antara lain: menurut Bintaro, kota diartikan sebagai sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daérah tersebut dan pendatang. Sedangkan menurut Louis Wirth, kota adalah pemukiman yang berpenduduk relatif besar dengan kepadatan tinggi, memiliki luas area terbatas, serta pada umumnya bersifat non-agraris. Alan S. Burger berpendapat kota merupakan suatu permukiman yang permanen dengan penduduk heterogen. Kota juga dilengkapi dengan fasilitas yang terintegritas membentuk suatu sistem sosial.

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut memiliki beberapa kesamaan antara lain: memiliki pusat aktivitas wilayah, memiliki banyak penduduk dengan kepadatan tinggi, memiliki sifat penduduk yang heterogen dan memiliki wilayah wewenang yang terbatas oleh suatu aturan atau konvensi. Dengan banyaknya faktor-faktor yang membentuk sebuah perkotaan maka perkembangan tidak dapat ditolak keberadaannya pada suatu perkotaan. Kota merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, selalu mengalami perkembangan, karena memiliki hubungan antara aktivitas yang terjadi di dalamnya dengan dimensi waktu (Zahnd, 1999). Menurut Kamus Tata Ruang (1997), pengertian perkembangan kota adalah pertumbuhan fisik suatu kawasan atau wilayah yang disertai dengan perkembangan non fisik yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Perkembangan kota dipengaruhi oleh banyak hal baik yang bersifat internal, berupa potensi

kawasan atau wilayah, maupun faktor eksternal, antara lain berupa hubungan interaksi dengan kawasan atau wilayah lain di sekitarnya.

Kota Parepare yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi merupakan salah satu kota pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai kota pelabuhan luas Kota Parepare terbilang kecil, sehingga perkembangan yang terjadi di Kota Parepare dapat terlihat dengan jelas. Pada awal abad ke-20, Kota Parepare merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Penandatanganan pernyataan pendek oleh *Tu'mailalang Towa* dan anggota Dewan *Bate Salapang* menandai periode itu. Pada tahun 1906 Sulawesi Selatan secara keseluruhan berada langsung di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda (Poelinggomang, 2004). Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara dijadikan satu wilayah pemerintahan yang dikenal dengan Pemerintahan Sulawesi Selatan dan Daerah Bawahan. Pada tanggal 31 Desember 1906 pemerintah Hindia Belanda membagi wilayah administratif di Sulawesi Selatan dan daerah taklukan menjadi tujuh bagian wilayah pemerintahan *afdeling*, salah satunya yaitu wilayah *afdeling* Parepare (Poelinggomang, 2004).

Etnis dominan yang bertempat di Kota Parepare pada masa Kolonial Belanda ada tiga yaitu penduduk Belanda, Penduduk China dan penduduk pribumi. Penataan Kota Parepare pada masa Hindia Belanda ini dibagi menjadi tiga zona yaitu: zona pertama zona inti kota, merupakan daerah pusat kegiatan yang dihuni oleh para pemerintahan Kolonial Belanda, zona kedua adalah zona bagian luar dari inti kota, didiami oleh komunitas pedagang yang umumnya China, dan zona yang ketiga adalah zona permukiman pribumi.

Seiring dengan perkembangan zaman, penataan Kota Parepare saat ini sudah berubah dibandingkan dengan pada masa Kolonial Belanda. Ketiga zona yang membagi kawasan Kota Parepare, kini sudah menghilang dan membaaur satu sama lain. Ketiga zona tersebut kini menjadi satu kecamatan yaitu Kecamatan Ujung sekaligus sebagai pusat Kota Parepare. Namun saat ini sudah tidak ada lagi penduduk Belanda yang bermukim di Kota Parepare. Sebagai salah satu kota yang pernah dijajah oleh Belanda, kehilangan ini bisa menjadi dampak yang mempengaruhi perkembangan yang terjadi di Kota Parepare.

Perkembangan Kota Parepare yang semakin bertumbuh tiap tahunnya diduga menjadi salah satu alasan yang mempengaruhi dalam pembentukan identitas Kecamatan Ujung. Ditetapkannya Kecamatan Ujung sebagai pusat Kota Parepare merupakan bukti bahwa perkembangan Kota Parepare dan Kecamatan Ujung terkait secara langsung. Menurut Budiarjo (1984) Kota di Indonesia mempunyai kecenderungan menghilangkan ciri karakter historis peninggalan Hindu-Belanda dan memunculkan “ketunggal-rupaan” arsitektur kota. hal ini disebabkan oleh diabaikannya aspek kesejahteraan pembentukan kota sehingga kesinambungan sejarah kawasan kota seolah terputus sebagai akibat pengendalian perkembangan yang kurang memperhatikan aspek morfologi kawasan. Warisan perencanaan pada zaman kolonial sangat terlihat pada bentukan fisik bangunan dan tata lingkungan (Hadinoto, 1996).

Warisan peninggalan Kolonial Belanda masih dapat kita temukan di Kecamatan Ujung, namun saat ini kesadaran akan identitas dan perhatian terhadap warisan ini kini mulai berkurang. Perencanaan yang tidak melihat unsur-unsur yang membentuk sebuah kota melalui penelusuran historis diduga merupakan salah satu alasannya. Salah satu contoh perencanaan tanpa mempertimbangkan aspek kesejarahan adalah diubahnya pasar peninggalan Kolonial Belanda menjadi kawasan hunian yang kini dihuni oleh penduduk pribumi.

Perkembangan tentu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan baik secara fisik maupun non-fisik. Waktu yang dibutuhkan dalam proses berkembang juga terbilang tidak sedikit, bahkan dapat melewati beberapa generasi. Sama halnya dengan morfologi kota terbentuk melalui proses yang panjang, setiap perubahan bentuk kawasan secara morfologis dapat memberikan arti serta manfaat yang sangat berharga bagi penanganan perkembangan suatu kawasan kota. Dengan mempelajari morfologi suatu kawasan kota, kiranya cacat morfologis suatu kawasan kota dapat terhindari karena proses belajar dari pengalaman kegagalan dan keberhasilan masa lampau merupakan salah satu proses pembentukan morfologi suatu kawasan kota (Markus, 2006). Berdasarkan fenomena tersebut penting untuk mengidentifikasi pola morfologi kota Kecamatan Ujung, serta bagaimana perkembangan Kota Parepare mempengaruhinya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola perkembangan Kota Parepare?
2. Bagaimana morfologi Kecamatan Ujung Kota Parepare sebagai pusat Kota Parepare?
3. Bagaimana pengaruh perkembangan Kota Parepare terhadap morfologi Kecamatan Ujung Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pola perkembangan Kota Parepare.
2. Mengidentifikasi morfologi Kecamatan Ujung Kota Parepare.
3. Mengidentifikasi pengaruh perkembangan Kota Parepare terhadap morfologi Kecamatan Ujung Kota Parepare.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah: (1) Sebagai kebutuhan data dalam perencanaan perkembangan Kota Parepare dan atau Kecamatan Ujung Kota Parepare. (2) sebagai bahan referensi dalam perencanaan perkembangan Kota Parepare dan atau Kecamatan Ujung Kota Parepare.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat terkait pengaruh perkembangan Kota Parepare terhadap morfologi Kecamatan Ujung Kota Parepare.

3. Bagi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota

Sebagai bahan referensi terkait pengaruh perkembangan Kota Parepare terhadap morfologi Kecamatan Ujung Kota Parepare.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terdiri dari lingkup wilayah dan substansi. Lingkup wilayah merujuk pada batas wilayah penelitian, sedangkan lingkup substansi terkait dengan hal-hal yang dibahas dalam penelitian.

1. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup spasial pada penelitian ini yaitu Kelurahan Labukkang, Ujung Sabbang, Ujung Bulu, dan Kelurahan Mallusetasi yang berada di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

2. Ruang Lingkup Substansi

Adapun hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini antara lain, Mengidentifikasi perkembangan yang terjadi di Kota Parepare, mengidentifikasi morfologi Kecamatan Ujung Kota Parepare, serta mengetahui pengaruh perkembangan kota terhadap morfologi pusat Kota Parepare.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini merupakan urutan atau susunan penulisan laporan penelitian. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Perkembangan Perkotaan terhadap Morfologi Pusat Kota” dimana di dalamnya membahas terkait perkembangan Kota Parepare berdasarkan aspek fisik dan non-fisik, serta morfologi Kecamatan Ujung berdasarkan pada elemen-elemen utama morfologi. Penelitian ini terdiri atas lima bab, dimana setiap babnya menjelaskan bagian tersendiri. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang hal-hal yang mendasari dalam penelitian perkembangan Kota Parepare dan Morfologi Kecamatan Ujung. Pada bab ini akan membahas latar belakang penelitian terkait isu-isu dan permasalahan yang terjadi di Kota Parepare dan Kecamatan Ujung, yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah. Selain itu penelitian ini juga mencakup tujuan dari penelitian, manfaat serta ruang lingkup penelitian yaitu pada Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Secara sistematis pada bab ini akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, memuat kajian kepustakaan berupa teori-teori dan kajian literatur terkait perkembangan kota dan morfologi kota. Selain itu bab ini juga mencakup kebijakan-kebijakan terkait perkembangan kota serta penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis dalam menyusun penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam mengidentifikasi perkembangan Kota Parepare, morfologi Kecamatan Ujung, serta pengaruh perkembangan Kota Parepare terhadap morfologi Kecamatan Ujung. Adapun pada bab ini mencakup lokasi penelitian, jenis, dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Deskripsi dan Analisis, membahas tentang gambaran umum Kota Parepare dan Kecamatan Ujung yang merupakan lokasi penelitian ini. Selain itu

pada bab ini juga mencakup hasil penelitian yang dilakukan berupa pola perkembangan Kota Parepare berdasarkan aspek fisik dan non-fisik, pola morfologi kecamatan Ujung, serta pengaruh perkembangan Kota Parepare terhadap morfologi Kecamatan Ujung.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran terkait Pengaruh Perkembangan Perkotaan terhadap Morfologi Pusat Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kota

Kota (*city*) adalah wilayah atau kawasan perkotaan yang mempunyai status administrasi sebagai sebuah kota. Adisasmita (2006) menyatakan bahwa umumnya suatu kawasan dapat dikatakan sebagai kota jika pada wilayah tersebut terdapat kegiatan penduduk yang terkonsentrasi pada kegiatan perekonomian, sosial, budaya, dan administrasi pemerintahan. Lebih rinci lagi, suatu kota merupakan kawasan dengan konsentrasi penduduk yang cukup tinggi, dimana kegiatan didominasi oleh kegiatan nonpertanian yang berupa, perdagangan dan jasa, baik pada bidang keuangan, transportasi, kesehatan, pariwisata, pendidikan, serta kegiatan industri.

Upaya dalam pembangunan perkotaan harus terus ditingkatkan dalam produktivitasnya sehingga dapat terus mendorong sektor-sektor pertanian, namun juga perlu memperhatikan sumberdaya yang tersedia, agar pelayanan sarana dan prasarana dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan lebih efisien. Pembangunan perkotaan sebisa mungkin mengupayakan pengembangan investasi yang ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan serta kekayaan budaya daerah.

Di dalam (UU No. 26 Tahun 2007) disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan dengan susunan perkotaan dengan fungsi utama sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, serta pemusatan kegiatan baik berupa kegiatan ekonomi, maupun sosial. Restina (2009) mengungkapkan perkotaan merupakan kawasan dengan permukiman yang relatif besar, padat dan permanen. Restina melanjutkan terdapat beberapa kriteria yang dapat merumuskan sebuah kota. Kriteria ini berupa:

- a. Kawasan dan penduduk yang besar dan bersifat permanen,
- b. Kepadatan minimum terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah

- c. Terdapat struktur dan ruang perkotaan,
- d. Konsentrasi kegiatan penduduk baik pada perekonomian maupun sosial,
- e. Tercapainya fungsi perkotaan minimum,
- f. Heterogenitas dan perbedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat,
- g. Pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian di tepi kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas,
- h. Pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat,
- i. Dan pusat penyebaran.

2.2 Perkembangan Kota dan Struktur Ruang

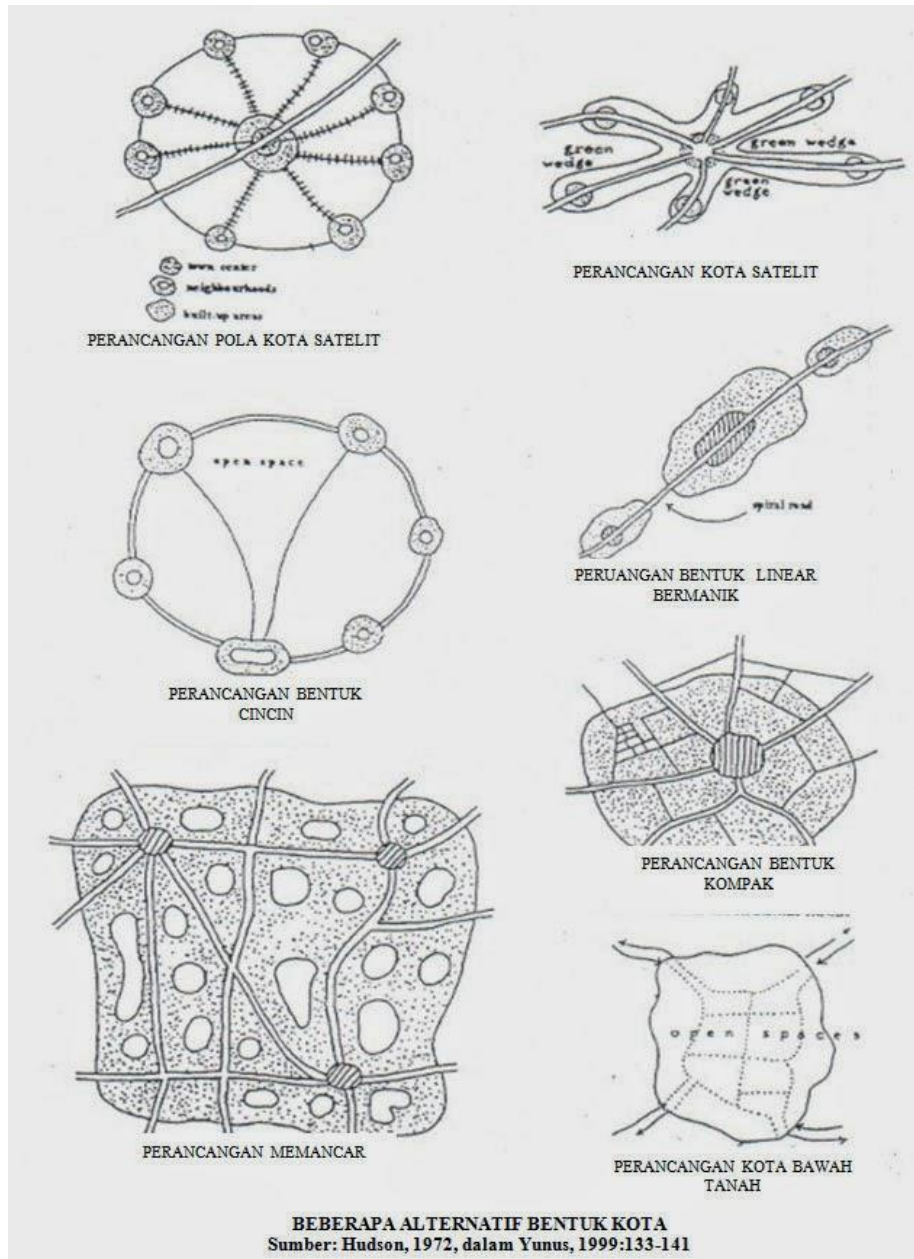
Pertumbuhan perkotaan merupakan sesuatu proses pergantian kondisi perkotaan dari sesuatu kondisi ke kondisi yang lain dalam waktu yang berbeda. Sorotan pergantian kondisi tersebut umumnya didasarkan pada waktu yang berbeda serta buat menganalisis ruang yang sama. Bagi J. H. Goode dalam Daldjoeni (1996: 87), pertumbuhan kota dipandang dari faktor- faktor jumlah penduduk, kemampuan perlengkapan ataupun area, kemajuan teknologi serta kemajuan dalam organisasi sosial.

Sebaliknya bagi Bintarto (1989), pertumbuhan kota bisa dilihat dari aspek zone- zone yang terletak di dalam daerah perkotaan. Dalam konsep ini Bintarto menarangkan pertumbuhan kota tersebut nampak dari pemakaian lahan yang membentuk zone- zone tertentu di dalam ruang perkotaaan. Sebaliknya bagi Branch (1995), wujud kota secara totalitas mencerminkan letaknya secara geografis serta ciri tempatnya. Branch pula mengemukakan contoh pola- pola pertumbuhan kota pada medan datar semacam: topografi, bangunan, jalan transportasi, ruang terbuka, kepadatan bangunan, hawa lokal, vegetasi tutupan serta mutu estetika.

Bersumber pada penampakan morfologi kota dan tipe penyebaran areal perkotaan yang terdapat, Hudson dalam Yunus (1999), mengemukakan sebagian alternatif model wujud kota. Secara garis besar terdapat tujuh buah model wujud kota yang dianjurkan, ialah;

- a. Wujud satelit serta pusat- pusat baru (*satelite and neighbourhood plans*), kota utama dengan kota- kota kecil hendak dijalin ikatan pertalian fungsional yang efisien serta efektif;
- b. Wujud stellar ataupun radial (*stellar or radial plans*), masing- masing lidah dibangun pusat aktivitas kedua yang berperan berikan pelayanan pada areal perkotaan serta yang menjorok ke dalam direncanakan selaku jalan hijau serta berperan selaku paru- paru kota, tempat tamasya serta tempat olah raga untuk penduduk kota;
- c. Wujud cincin (*circuit linier or ring plans*), kota tumbuh di selama jalur utama yang melingkar, di bagian tengah daerah dipertahankan selaku wilayah hijau terbuka;
- d. Wujud linier bermanik (*bealdded linier plans*), pusat perkotaan yang lebih kecil berkembang di kanan- kiri pusat perkotaan utamanya, perkembangan perkotaan cuma terbatas di selama jalur utama hingga pola biasanya linier, dipinggir jalur umumnya dihuni bangunan komersial serta dibelakangnya dihuni permukiman penduduk;
- e. Wujud inti/ kompak (*the core or compact plans*), pertumbuhan kota umumnya lebih didominasi oleh pertumbuhan vertikal sehingga membolehkan terciptanya konsentrasi banyak bangunan pada areal kecil;
- f. Wujud memencar (*dispersed city plans*), dalam kesatuan morfologi yang besar serta kompak ada sebagian urban center, dimana tiap- tiap pusat memiliki tim fungsi- fungsi yang spesial serta berbeda satu sama lain; dan
- g. Wujud kota dasar tanah (*under ground city plans*), struktur perkotaannya dibentuk di dasar permukaan bumi sehingga kenampakan morfologinya tidak

bisa diamati pada permukaan bumi, di wilayah atasnya berperan selaku jalan hijau ataupun wilayah pertanian yang senantiasa hijau.



Gambar 2.1 Alternatif Bentuk Kota

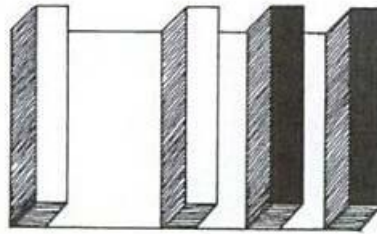
Sumber: Hudson, 1972, dalam Yunus, 1999:133-141

Pertumbuhan kota bagi Raharjo (Widyaningsih, 2001), bermakna pergantian yang dirasakan oleh wilayah perkotaan pada aspek- aspek kehidupan serta penghidupan kota tersebut, dari tidak terdapat jadi terdapat, dari sedikit jadi banyak, dari kecil jadi besar, dari ketersediaan lahan yang luas jadi terbatas, dari

pemakaian ruang yang sedikit jadi teraglomerasi secara luas, serta seterusnya. Raharjo pula meningkatkan kalau aspek lain yang pengaruhi pertumbuhan kota ialah; penduduk, posisi yang strategis, guna kawasan perkotaan, kelengkapan sarana sosial ekonomi, kelengkapan fasilitas serta prasarana transportasi, aspek kesesuaian lahan, dan kemajuan serta kenaikan di bidang teknologi.

Secara teoritis diketahui tiga metode pertumbuhan di dalam kota, dengan 3 sebutan teknis, ialah pertumbuhan horizontal, pertumbuhan vertikal, serta pertumbuhan interstisial (Markus Zahnd, 2006).

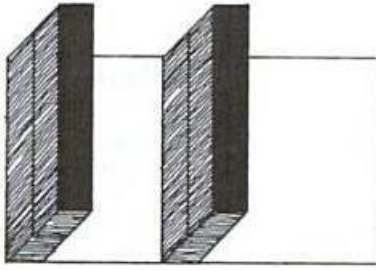
1. Pertumbuhan horizontal merupakan metode pertumbuhan ke arah luar. Maksudnya, wilayah meningkat, sebaliknya ketinggian serta kuantitas lahan terbangun (coverage) senantiasa sama. Pertumbuhan dengan metode ini kerap terjalin di pinggir kota, dimana lahan masih lebih murah serta dekat jalur raya yang menuju ke kota.



Gambar 2.2 Perkembangan Horizontal

Sumber: Markus Zahnd, 2006

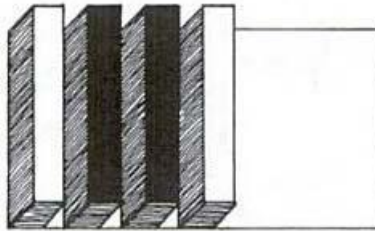
2. Pertumbuhan vertikal ataupun metode pertumbuhan yang bergerak ke atas. Maksudnya merupakan wilayah pembangunan serta kuantitas lahan terbangun senantiasa sama, sebaliknya ketinggian bangunan-bangunan meningkat. Pertumbuhan dengan metode ini kerap terjalin di pusat kota (di mana harga lahan mahal) serta pusat-pusat perdagangan yang mempunyai kemampuan ekonomi. Pusat-pusat perdagangan yang memiliki potensi ekonomi.



Gambar 2.3 Perkembangan Verikal

Sumber: Markus Zahnd, 2006

3. Pertumbuhan interstisial ataupun metode berkembang yang bergerak ke dalam. Maksudnya, wilayah serta ketinggian bangunan- bangunan rata- rata sama, sebaliknya kuantitas lahan terbangun meningkat. Pertumbuhan dengan metode ini kerap terjalin di pusat kota serta antara pusat kota serta pinggir kota yang kawasannya telah dibatasi serta cuma bisa dipadatkan.



Gambar 2.4 Perkembangan Interstisial

Sumber: Markus Zahnd, 2006

Di kota-kota modern, ketiga mode pembangunan ini terjadi tidak hanya secara individual, tetapi seringkali secara bersamaan. Selain itu, ketiga jalur pembangunan tersebut saat ini sangat pesat terutama di kota-kota besar, sehingga kualitas pembangunan seringkali buruk.

Oleh karena itu, dinamika pembangunan daerah perlu dicermati berdasarkan tiga fakta berikut ini (Markus Zhand, 2006):

- Pembangunan perkotaan bersifat abstrak. Artinya, semua pembangunan kota akan berlangsung dalam tiga dimensi. Massa dan kenampakan ruang berhubungan erat sebagai produk.
- Pembangunan perkotaan tidak dilakukan secara langsung. Dengan kata lain, semua pembangunan kota dilakukan dalam empat dimensi. Prosesnya membutuhkan waktu.

- Pembangunan perkotaan tidak terjadi secara otomatis. Ini berarti bahwa semua pembangunan perkotaan membutuhkan tindakan manusia. Keterlibatan manusia dapat dilihat dari dua skala atau perspektif: atas dan bawah. Skala atas menunjukkan aktivitas ekonomi yang sedikit abstrak, dan skala yang lebih rendah secara khusus berfokus pada perilaku manusia.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola perkembangan kota terjadi pada waktu yang berbeda, tetapi dianalisis dalam ruang yang sama. Selain itu, persebaran kawasan dalam tata guna lahan perkotaan dapat mengidentifikasi pola perkembangan perkotaan. Pembangunan kota sendiri tidak terjadi begitu saja. Ada proses dan waktu yang harus dilalui agar pembangunan kota dapat berlangsung.

2.3 Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Perkembangan Kota

Menurut Branch (1995), perkembangan pola struktur perkotaan yang umum sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor-faktor ini adalah:

- Faktor internal meliputi:
 1. Kondisi geografis yang mempengaruhi fungsi dan bentuk fisik kota. Misalnya, kota yang bertindak sebagai pusat distribusi harus terletak di dekat pusat transportasi, pertemuan rute transportasi regional, atau pelabuhan laut. Misalnya, kota pesisir cenderung berbentuk setengah lingkaran, dengan pusat setengah lingkaran adalah pelabuhan.
 2. Tapak (site) merupakan faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan kota. Salah satu yang dipertimbangkan dalam kondisi tapak adalah topografi. Kota-kota di tanah datar dapat dengan mudah berkembang ke segala arah, tetapi kota-kota di pegunungan biasanya memiliki batasan topografi. Kondisi situs lainnya terkait dengan kondisi geologis. Zona patahan geologi umumnya dihindari dalam perencanaan kota.
 3. Fungsi kota juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan kota multifungsi. Biasanya secara ekonomi lebih kuat dan lebih cepat berkembang daripada kota fungsi tunggal, seperti kota pertambangan atau kota yang dikembangkan sebagai kota fungsional B. Pusat perdagangan

umumnya lebih cepat daripada satu kota yang berfungsi di kota lain yang berfungsi. Short (1984) mengemukakan bahwa ada lima fungsi perkotaan yang dapat mencerminkan karakteristik struktur ruang kota: (a) kota sebagai tempat kerja, (b) kota sebagai tempat tinggal, dan (c) pergerakan dan transportasi, (d) Kota sebagai tempat investasi, (e) Kota sebagai tempat politik.

4. Sejarah dan kebudayaan juga mempengaruhi karakteristik fisik dan sifat masyarakat kota. Kota yang sejarahnya direncanakan sebagai ibu kota kerajaan akan berbeda dengan perkembangan kota yang sejak awalnya tumbuh secara organisasi. Kepercayaan dan kultur masyarakat juga mempengaruhi daya perkembangan kota. Terdapat tempat-tempat tertentu yang karena kepercayaan dihindari untuk perkembangan tertentu.
 5. Elemen umum seperti jaringan jalan, penyediaan air bersih yang terkait dengan kebutuhan masyarakat luas, dan ketersediaan elemen umum menarik kota ke arah tertentu.
- Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan kota:
 1. Fungsi primer dan sekunder suatu kota tidak dapat dipisahkan dari keterkaitannya dengan wilayah lain dan bersifat makro (domestik dan internasional) atau mikro (regional) antara wilayah dengan wilayah atau wilayah sekitarnya, pergerakan orang-orang hebat dan barang-barang.
 2. Arena kota merupakan tempat pemusatan aktivitas, maka fungsi kota adalah sebagai daya tarik (urbanisasi) agar wilayah sekitarnya menyerbu kota.
 3. Kelancaran transportasi dan infrastruktur, semakin baik transportasi ke kota, semakin nyaman pembangunan perkotaan, sehingga kota akan berkembang baik melalui transportasi udara, laut dan darat.

Selain itu aspek perkembangan wilayah tidak dapat lepas dari adanya ikatan-ikatan dari ruang-ruang wilayah secara geografis. Menurut Chapin dalam Soekanjono (1998) terdapat 2 hal yang mempengaruhi tuntutan kebutuhan ruang yang selanjutnya menyebabkan perubahan penggunaan lahan yaitu: Adanya perkembangan penduduk dan perekonomian, serta pengaruh sistem aktivitas,

sistem perkembangan, dan sistem lingkungan. Variabel lainnya yang berpengaruh dalam proses perkembangan kota menurut Rahardjo adalah:

- a. Penduduk, keadaan penduduk, proses penduduk, lingkungan sosial penduduk.
- b. Lokasi yang strategis, hingga aksesibilitas tinggi.
- c. Fungsi kawasan perkotaan.
- d. Kelengkapan fasilitas sosial ekonomi yang merupakan faktor utama timbulnya perkembangan dan pertumbuhan pusat kota.
- e. Integritas transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk ke segala arah.
- f. Faktor kesesuaian negara.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut terdapat beberapa kesamaan yang dikemukakan oleh para ahli terkait faktor-faktor dalam perkembangan kota. Fakto-faktor ini terbagi atas dua yaitu faktor fisik dan faktor non-fisik dari perkembangan kota. Faktor fisik mencakup keruangan dari perkotaan seperti keadaan geografis, tapak, fungsi kawasan perkotaan, serta kelengkapan sarana dan prasarana transportasi. Jika dibakukan, maka faktor fisik perkembangan perkotaan terdiri atas tata-guna lahan (*land use*) dan pola jalan (*street pattern*).

1. Tata Guna Lahan (*Land Use*)

Elemen ini bersifat sementara dan dinamis dan dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun kembali dan merencanakan fitur baru untuk bangunan yang Anda buat. Artinya, dapat digunakan dengan menggabungkan dan mengurangi persil bangunan dan mengubah pola jalan (Carmona et.al., 2003). Penggunaan lahan adalah suatu proses yang berkesinambungan dari pemanfaatan lahan yang ada secara optimal, efektif dan efisien untuk fungsi tertentu. Tata guna lahan menunjukkan hubungan antara sirkulasi dalam suatu ruang dengan kepadatan atau fungsi kegiatan, dan setiap ruang memiliki karakteristik penggunaan lahan yang berbeda tergantung pada kapasitasnya. Perkembangan penggunaan lahan di suatu wilayah dapat dilihat dari tiga aspek yaitu jenis kegiatan, intensitas penggunaan, dan aksesibilitas antar penggunaan lahan (Warpani, 1990). Detailnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jenis-jenis kegiatan tersebut bersifat khusus dalam kaitannya dengan dua aspek: aspek umum terkait dengan penggunaannya (komersial, industri, perumahan) dan yang lebih spesifik (daya dukung, luas, dan fungsi) dapat dilihat di samping.
- b. Intensitas penggunaan lahan dapat dinyatakan dengan kepadatan bangunan yang diperoleh dengan membandingkan luas lantai per satuan luas. Padahal, tolok ukur ini belum bisa mencerminkan intensitas wilayah yang diukur. Penggunaannya dapat dikombinasikan dengan data jenis aktivitas yang menggambarkan perjalanan dari masing-masing negara.
- c. Hubungan penggunaan lahan erat kaitannya dengan jaringan jalan. Jaringan jalan yang memungkinkan Anda untuk menghidupkan lahan dengan fungsi tertentu.

2. Pola Jalan (*Street Pattern*)

Pola jaringan jalan terbentuk melalui proses yang panjang dan merupakan bagian atau lanjutan dari pola sebelumnya. Pola jalan beraturan atau tidak beraturan (alami) dan sangat dipengaruhi oleh medan kawasan (Carmona et.al., 2003). Menurut Yunus (2000), ada enam jenis jaringan jalan yang dapat digunakan untuk mempelajari perkembangan ruang, meliputi:

- a. Sistem pola jalan organik
- b. Sistem pola jalan radial konsentris
- c. Sistem pola kotak atau grid
- d. Sistem pola jalan angular
- e. Sistem pola jalan aksial
- f. Sistem pola beban kurva linier

Selain itu, terdapat pula klasifikasi jaringan jalan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap ruas jalan yang ada di Indonesia, mulai dari jalan protokol sampai dengan jalan lingkungan. Berikut adalah klasifikasi jalan berdasar sifat dan pergerakan lalu lintas serta fungsinya (Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004):

- a. jalan arteri primer, menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, dengan dimensi minimal 15 (lima belas) meter;
- b. jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, dengan dimensi minimal primer 10 (sepuluh) meter;
- c. jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan, dengan dimensi minimal 7 (tujuh) meter;
- d. Jalan lingkungan primer menghubungkan pusat kegiatan pedesaan dengan jalan pedesaan dengan dimensi minimal 5 meter;
- e. Jalan arteri sekunder yang menghubungkan area utama dengan sub-area pertama, sub-area pertama dengan sub-area pertama, atau sub-area pertama dengan sub-area kedua. Dimensi minimum adalah 15 meter.
- f. Jalan pengumpulan sekunder yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Dimensi minimum adalah 5 meter.
- g. Jalan sekunder lokal dengan dimensi minimal tiga meter yang menghubungkan sub-area pertama dengan rumah, sub-area kedua dengan rumah dan sub-area ketiga dengan rumah.
- h. Jalan lingkungan sekunder yang menghubungkan petak kota dengan dimensi minimal 2 meter. Dan
- i. Jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

2.4 Faktor Non-fisik Perkembangan Perkotaan

Selain faktor fisik yang mempengaruhi perkembangan kota, faktor non fisik juga berperan dalam pembangunan kota. Madanipour (1996) menjelaskan konsep ruang sosial dalam melihat dan memahami fenomena ruang kota. Pandangan ini didasarkan pada hubungan antara “masyarakat perkotaan dan ruang kota”, dan

menjelaskan bahwa memahami proses perkembangan kota memungkinkan kita melihat interaksi berbagai elemen. Banyak aktor yang berinteraksi terlibat dalam proses ini, dan interaksi mereka dengan struktur ruang sosial dapat dipahami (Mandanipour, 1996).

Dengan memahami struktur ruang sosial, kita dapat memahami proses dimana segala sesuatu di kota terbentuk dari bangunan, objek dan ruang lingkungan perkotaan, seperti hubungan antara orang, peristiwa dan semua elemen yang berpengaruh. Arsitektur dan ruang kota tidak hanya refleksi dan fungsi, tetapi juga manifestasi dari sistem budaya. Memahami struktur sosial suatu budaya, sekelompok orang tertentu, atau kelompok etnis memungkinkan untuk melihat dan memahami lingkungan yang dibangun oleh kelompok itu (Kostof, 1991). Dengan kata lain, untuk memahami dan membaca lingkungan hidup, baik kecil maupun perkotaan, perlu juga memahami budaya di balik penciptaan lingkungan binaan. Mengenai perkembangan kota, Kostoff (1991) menyatakan bahwa kota merupakan perpaduan antara bangunan dan penduduk, dan secara alami terjadi dan berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat untuk mengembangkan peradaban.

Dari perpaduan ini, kota-kota tumbuh sesuai dengan kondisi latar belakangnya yang membentuk lingkungan yang secara historis, budaya, fisik, sosial, ekonomi, saling terkait, dan bersama-sama dibangun. .. Bentuk kota atau permukiman merupakan hasil proses budaya manusia dalam menciptakan ruang kehidupannya, sesuai kondisi sita, geografis, dan terus berkembang menurut proses sejarah yang mengikutinya. Menurut Kostof (1991), peran dan perkembangan masyarakat sangat berpengaruh dalam suatu proses perkembangan kota. Kota lahir dan berkembang secara spontan diatur menurut pendapat masyarakat yang dipengaruhi oleh adat istiadat, kepercayaan, agama, sesuai dengan kondisi alamiah, sehingga lahir suatu pola kota organik yang berorientasi pada alam dan mempunyai sosial yang kuat. Oleh karena itu dalam suatu kota organik akan terjadi saling ketergantungan antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial untuk menghasilkan suatu pola yang harmonis antara kehidupan manusia dan lingkungan alamnya.

Dalam hal fisik, dari Hiller (1996) wujud kota terbentuk menurut banyak sekali elemen fisik mulai menurut gerombolan unit-unit bangunan, lalu menciptakan beberapa tempat atau bagian daerah kota dan akhirnya menciptakan kota. Hillier (1996) pula menambahkan bahwa fisik kota bisa dipahami melalui 2 hal, yaitu pertama, fisik dan struktur ruang dalam setiap bagian kota yang adalah output menurut perubahan secara alami sedikit demi sedikit menurut ketika ke ketika mulai menurut skala mini sampai membentuk suatu pola dan fungsi tertentu. Kedua, proses perkembangan kota yang ditentukan sang sosial dan ekonomi, menciptakan pola dan struktur ruang kota cenderung melahirkan sesuatu yang kompleks. Oleh karena itu proses pembentukan dan perubahan kota secara alami adalah serangkaian output menurut perubahan fisik dan non-fisik dalam skala makro dan mikro sebagai akibatnya membentuk tatanan dan wujud kota yang tidak terduga.

Selanjutnya Hillier (1999) menjelaskan interaksi yang saling ketergantungan antara sosial, budaya dan bentuk fisik pada pembentukan ruang. Menurut Hillier (1996) bahwa suatu ruang akan menampilkan bukti diri sosial menurut bentuk fisik dan spasialnya apabila: pertama mengolaborasikan ruang ke pada pola yang sanggup diterapkan secara normatif. Kedua, mengolaborasi bentuk fisik dan bagian atas sebagai pola-pola dimana unsur budaya ditampilkan. Kolaborasi bentuk sosial ke dalam lingkungan akan mencerminkan bukti diri bentuk fisik ruang. Dengan demikian ruang yang terbentuk akan membuktikan keberadaan sosial dan budaya.

Menurut Rahardjo (1989) faktor-faktor perkembangan dan pertumbuhan yang bekerja dalam suatu kota bisa membuat dan menumbuhkan kota dalam suatu arah tertentu. Ada 3 faktor primer yang sangat memilih pola perkembangan dan pertumbuhan kota:

- a. Faktor manusia yang mempengaruhi aspek perkembangan penduduk perkotaan, baik dengan kelahiran maupun migrasi ke kota. Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan status sosial, pengembangan pengetahuan dan teknologi.

- b. Berkaitan dengan faktor aktivitas manusia yaitu aktivitas tenaga kerja, aktivitas fungsional, aktivitas ekonomi perkotaan dan aktivitas di bidang hubungan masyarakat.
- c. Faktor pola pergerakan, yaitu Akibat perkembangan yang disebabkan oleh dua faktor pertumbuhan penduduk yang disertai dengan perkembangan fungsi-fungsi kegiatan tersebut, maka diperlukan suatu pola komunikasi antar pusat-pusat kegiatan tersebut.

Perkembangan ruang kota tidak terlepas dari kondisi non fisik yang terjadi disana. Sudarto (1981) menjelaskan bahwa pada hakekatnya terdapat hubungan fungsional antara pola dan struktur masyarakat dengan pola dan struktur lingkungan fisik. Oleh karena itu, penampilan fisik kota berkembang seiring dengan perkembangan peradaban dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola sosial ekonomi penduduknya. Gagasan John Brickerhof Jackson (1984) dalam bukunya "Founding Vernacular Landscape" adalah bahwa "bentuk kota adalah citra kehidupan manusia kita: ketekunan, harapan tinggi, dan saling mencintai. Pengalaman." Dari sudut pandang ini, kota adalah tempat tinggal manusia, manifestasi dari hasil perencanaan dan desain yang diisi dengan berbagai elemen seperti bangunan, jalan, ruang terbuka, dll. Oleh karena itu, kota adalah hasil dari nilai dari perilaku manusia di ruang kota, menciptakan pola kontur visual lingkungan. DR. Ir. Profesor Zoe`raini Djamal Irwan, M.Si, dalam bukunya Environmental Challenges dan Urban Landscapes (2004), aspek utama yang digunakan untuk menjelaskan makna kota dari perspektif berbagai ahli adalah morfologi, populasi, hukum, ekonomi dan sosial.

Selain itu, Purwanto (2001) berpendapat bahwa gambar adalah penghubung antara atribut fisik dan makna, tetapi sengaja berfokus pada fungsi bentuk, dan pengetahuan manusia tentang kota. Citra kota muncul dari pola dan struktur lingkungan fisik. Lingkungan fisik dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan, adat dan politik yang pada akhirnya mempengaruhi penampilan fisiknya dalam perkembangannya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka perkembangan perkotaan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek fisiknya saja, namun juga dipengaruhi oleh aspek non-

fisik. Kolaborasi antara dua aspek ini menghasilkan perubahan yang terjadi pada wilayah perkotaan sehingga membentuk sebuah pola. Pada perkembangan perkotaan, aspek non-fisik yang terpengaruh berdasarkan pada para ahli memiliki beberapa kesamaan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik.

Berdasarkan pada poin ini, maka aspek sosial yang mempengaruhi perkembangan pada perkotaan tidak lepas peranannya dengan sebaran fasilitas yang ada. Ketersediaan fasilitas penunjang ini merupakan salah satu indikator untuk menilai perkembangan dari suatu perkotaan berdasarkan pada aspek sosial, ekonomi, politik serta aspek-aspek lainnya. Keberadaan fasilitas memberi pengaruh pada seberapa jauh suatu wilayah telah menjalankan fungsinya. Menurut Tarigan (2005), pada dasarnya suatu wilayah dapat dikatakan telah menjalankan fungsinya apabila tersedia berbagai jenis fasilitas perkotaan, salah satunya keberadaan pusat penyediaan fasilitas sosial (fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan lainnya) yang didukung oleh peran infrastruktur sebagai aksesibilitas. Lebih lanjut, kebutuhan fasilitas di perkotaan dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk, status sosial ekonomi, nilai-nilai kebudayaan dan antropologi (Sujarto, 2001).

Pada dasarnya, fasilitas sosial dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat yang bersifat memberikan kepuasan sosial, mental dan spiritual, yang antara lain terdiri dari fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, rekreasi, peribadatan, olahraga, pemerintahan serta fasilitas pemakaman (Burdah, 2006 dalam Helnita, 2013). Pembagian jenis fasilitas umum dan sarana pelayanan bagi masyarakat antara lain (Udjianto, 1994):

1. Sarana pelayanan dan kesejahteraan (peribadatan, kesehatan, pendidikan, keamanan).
2. Sarana kelembagaan (kantor pemerintahan, dan perkantoran).
3. Sarana pelayanan ekonomi (pasar, pusat perdagangan, pergudangan, dan toko atau warung).

Pembagian jenis fasilitas umum serta sarana pelayanan bagi masyarakat, akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Sarana pelayanan dan kesejahteraan.

Secara garis besar pelayanan sosial menjadi bentuk kebijakan sosial yang bisa dinyatakan bahwa setiap undang-undang dan peraturan yang menyangkut kehidupan sosial rakyat (Ibrahim, 2010). Pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki interaksi menggunakan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial sering diklaim pula menjadi pelayanan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial pada artian yang sangat meliputi banyak sekali tindakan yang dilakukan insan untuk mencapai taraf kehidupan rakyat yang lebih baik. Menurut Waltheral Friedlander pada Muhidin (1992), kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir menurut pelayanan-pelayanan dan forum sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan grup untuk mencapai baku hayati menurut kesehatan yang memuaskan, dan rekanan-rekanan eksklusif dan sosial yang memungkinkan mereka untuk menyebarkan kemampuannya sepenuhnya dan menaikkan kesejahteraannya selaras menggunakan kebutuhan famili dan rakyat.

Elizabeth Wicked pada Muhidin (1992), pula mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial termasuk pada dalamnya peraturan perundangan, program, tunjangan dan pelayanan yang mengklaim atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang fundamental menurut rakyat dan menjaga ketentraman pada rakyat. Pelayanan sosial ini secara luas meliputi fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial pada bidang pendidikan, kesehatan, energi kerja dan sebagainya. Menurut Muhidin, 1992, fungsi pelayanan sosial bisa mengategorikan pada banyak sekali cara tergantung menurut tujuan klasifikasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi sosial menjadi berikut:

1. Meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat.
2. Pengembangan sumber daya manusia.
3. Arahan masyarakat untuk perubahan sosial dan adaptasi sosial.

4. Menciptakan mobilitas dan sumber daya masyarakat untuk tujuan pembangunan.
5. Menyediakan dan menerapkan struktur kelembagaan untuk tujuan menyediakan layanan yang terorganisir dan berfungsi.

Penyebarluasan proposal layanan dalam pembangunan bertujuan untuk membuat perbedaan itu sendiri melalui program pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan. Penyembuhan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bertujuan untuk membantu seseorang mengatasi masalahnya, baik secara individu, kelompok, maupun dalam keluarga dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, distribusi dan ketersediaan proposal layanan dan kesejahteraan tidak hanya dapat mengukur tingkat penyediaan layanan publik, tetapi juga bentuk perkembangan kota itu sendiri. Namun sebaliknya ketika fasilitas pelayanan yang tidak dimanfaatkan masyarakat menjadi tersedia. Penyebab masalah ini adalah:

1. Birokrat
2. Perbedaan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masalah dan kewajiban atau tanggung jawab.
3. Diskriminasi.
4. Jarak geografis antara pelayanan masyarakat yang membutuhkan kesejahteraan sosial (Muhidin, 1992).

Untuk itu, tujuan fasilitas pelayanan memegang peranan penting dalam pembangunan perkotaan. Pada tahun 2009, Suharto menyatakan tujuan fasilitas layanan ini dalam format berikut:

1. Mendukung masyarakat dalam menjangkau atau menggunakan layanan yang tersedia.
2. Sebagai penunjang dan rehabilitasi sarana kesehatan, pendidikan, pembiayaan sarana lain, dll.
3. Sebagai bentuk pembangunan.

Tujuan di atas sangat penting untuk mencapai keberhasilan fasilitas pelayanan yang ada. Selain itu, kesejahteraan sosial juga ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, baik melalui dukungan dan pembangunan, serta dapat membantu tercapainya penerimaan kesejahteraan sosial. Mencapai tujuan yang dimaksud tidak lebih dari membantu individu dalam masyarakat menjadi mandiri. Dengan kata lain, itu adalah individu yang telah mencapai fungsi sosial.

2. Sarana Kelembagaan

Kelembagaan sendiri mempunyai arti sesuatu yang sudah disepakati dan distrukturisasi terkait konduite kiprah yang berlaku pada sebuah interaksi dan definisinya telah fundamental dan membudaya. Aspek politik yang meliputi aspek kelembagaan menekankan dalam tatanan nilai moral, pola interaksi insan, dan peraturan-peraturan yang berlaku pada warga (Ernan, 2009). Suatu forum dibuat buat memenuhi kebutuhan insan dan adalah suatu konsep yang terpadu menggunakan struktur, adalah nir saja melibatkan pola kegiatan yang lahir menurut segi sosial buat memenuhi kebutuhan insan namun pula pola organisasi buat melaksanakannya.

Menurut Veblen pada Yustika, 2013, kelembagaan merupakan sekumpulan kebiasaan dan syarat-syarat ideal (menjadi subyek menurut perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang paripurna melalui norma dalam masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian kelembagaan berperan menjadi stimulus dan petunjuk terhadap konduite individu. Dalam hal ini, aktivitas individu bukanlah faktor penyebab mendasar pada pengambilan keputusan, sebagai akibatnya dalam posisi ini nir terdapat loka buat memulai suatu teori.

Menurut pandangan ahli, kelembagaan rentang dipengaruhi melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir pada warga lantaran warga dipenuhi banyak sekali aturan, guna mengatur konduite insan maka kelembagaan menjadi media atau wadah pada menciptakan pola-pola yang sudah memiliki kekuatan yang permanen dan kegiatan guna memenuhi kebutuhan wajib yang dijalankan melalui pola yang terdapat pada kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibentuk untuk mengatur pola konduite dan pemenuhan kebutuhan insan, maka eksistensi kelembagaan akan menaruh donasi bagi kehidupan warga.

Selain itu, sarana kelembagaan tidak lepas kaitannya dengan perkembangan perkotaan. Salah satu perwujudan pengelolaan daerah perkantoran tidak jauh dalam aktivitas kelembagaan daerah perkantoran. Kelembagaan daerah perkantoran mempunyai tujuan dalam membentuk pembangunan yang berkelanjutan, dimana suatu daerah perkotaan wajib dikembangkan dan dikelola menjadi daerah perkotaan sinkron menggunakan besaran atau jenis kawasannya dari ketentuan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009. Kemudian tujuan lain menurut eksistensi kelembagaan daerah perkantoran dengan menaikkan wawasan dan kemampuan dan perilaku aparat pada pembentukan jaringan dan koordinasi buat mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah perkotaan.

Oleh karenanya, diharapkan penguatan forum pengelola daerah perkantoran pada taraf kota/kabupaten juga provinsi guna mewujudkan infrastruktur daerah perkotaan, akibatnya dapat mencapai tujuan pembangunan daerah perkotaan. Penguatan kelembagaan dalam daerah perkantoran biasanya dilaksanakan melalui:

1. Optimasi peran dan fungsi lembaga, baik pada pemerintahan kota/kabupaten maupun provinsi, atau lembaga pada kawasan perkantoran yang telah ada. Penguatan kelembagaan yang telah ada akan lebih mudah dan cepat berjalan dibandingkan pembuatan kelembagaan yang baru yang belum tentu sesuai dan dikehendaki oleh masyarakat pada kawasan perkantoran tersebut.
2. Peningkatan hubungan antar lembaga pengelola kawasan perkotaan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Pemerintah desa saat ini sangat didorong untuk bekerja sama antar desa tersebut, dan peran pemerintah kabupaten diupayakan untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan membawa manfaat terbaik bagi penduduk.
3. Membentuk satgas di lingkungan pemerintah daerah sebagai pelaksana lapangan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah. Masing-masing gugus tugas berperan sebagai pembina, antara lain baik dari sisi keahlian sektoral, pengelolaan pembangunan daerah, maupun keberlanjutan yang berkelanjutan.

Pedoman lain terkait dengan instansi bidang perkantoran dapat ditemukan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan:

1. Daerah akan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.
2. Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan perwujudan dari pelaksanaan pekerjaan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional.
3. Kementerian atau non kementerian akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, berdasarkan pemetaan layanan wajib pemerintah, yang tidak terkait dengan layanan wajib Pasal 24 dan layanan pemerintah yang diprioritaskan.

Aturan pada pasal di atas telah disebutkan bagaimana alur koordinasi, organisasi dan pengaturan kelembagaan sudah dijelaskan. Dimana setiap daerah bertanggungjawab untuk pembangunan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Kemudian lembaga yang berada di luar urusan daerah wajib melakukan integritas dan harmonisasi pembangunan dengan pihak pembangunan daerah.

3. Sarana Pelayanan Ekonomi

Seiring dengan perjalanan dari waktu ke waktu, pada umumnya provinsi dan kabupaten/kota mengalami peningkatan jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk tersebut harus diimbangi dengan penyediaan berbagai fasilitas yang dapat menunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Keadaan ini yang kemudian menjadi acuan dalam peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat, baik pada fasilitas pelayanan sosial maupun pada fasilitas pelayanan ekonomi. Dalam menjalankan kegiatan pribadi maupun kegiatan sosial masyarakat membutuhkan sejumlah fasilitas yang mendukung aktifitas mereka sebagai salah satu pelayanan lokal bagi masyarakat. Berbagai fungsi pelayan yang diharapkan

agar dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan banyaknya penduduk yang ada dibutuhkan analisis tertentu terhadap data saran dan prasaran yang tersedia. Beberapa fasilitas ekonomi antara lain pasar, pertokoan, warung makan, dan fasilitas lain yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Ruang Lingkungan Hidup Perkotaan menyatakan bahwa fasilitas ekonomi selalu berdiri sendiri dan tidak selalu terpisah dari fasilitas bangunan lainnya. Standar pasokan memperhitungkan tidak hanya jumlah penduduk yang dipasok, tetapi juga desain spasial unit atau kelompok lingkungan yang ada. Hal ini, tentu saja, mungkin terkait dengan bentuk kawasan pemukiman yang dirancang untuk situasi ekologis. Di sisi lain, penempatan penawaran fasilitas ini mempertimbangkan jangkauan radius area layanan dari segi kebutuhan dasar proposal yang harus dipenuhi untuk memberikan layanan di area tertentu. Berdasarkan cakupan pelayanannya, jenis fasilitas ekonomi dikategorikan sebagai berikut:

- a. Toko atau warung (skala pelayanan unit RT 250 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari.
- b. Pertokoan (skala pelayanan 6000 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa misalnya wartel, percetakan, dan sebagainya.
- c. Pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan), yang menjual kebutuhan sehari-hari termasuk bahan pangan, bahan pakaian, kelontong, alat pendidikan, perabot rumah tangga, dan pelayanan jasa.

2.5 Morfologi

Dalam beberapa literatur, istilah morfologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari proses terbentuknya, struktur, atau kenampakan suatu bagian, unsur, atau wujud dari suatu unsur. Menurut Loeckx dan Vermeulen (Andiana, 2007), morfologi adalah studi tentang bagaimana setiap elemen tunggal membangun sebuah kota dan bagaimana proyek individu berkontribusi pada proyek kolektif. Morfologi terdiri dari *Morph*, yang berarti bentuk, dan *Logos*, yang berarti ilmu. Sederhananya, morfologi perkotaan adalah studi tentang

produk logis morfologi fisik. Morfologi merupakan pendekatan untuk memahami bentuk logis suatu kota sebagai produk perubahan sosio-spasial. Istilah morfologi berkaitan erat dengan tipologi, karena setiap ciri sosio-spasial berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Sederhananya, Markus Zahn mencerminkan pemahamannya tentang istilah morfologi sebagai bentukan benda-benda yang berupa kota-kota besar. Morfologi biasanya digunakan pada skala perkotaan dan regional.

Morfologi, di sisi lain, adalah klasifikasi kecil dari karakteristik atau karakteristik pembentukan objek dalam bentuk fisik suatu kota. Istilah tipologi sering digunakan untuk mendefinisikan bentuk elemen perkotaan seperti jalan, ruang terbuka hijau, dan bangunan. Menurut FDK Ching (Andriana, 2007), morfologi berkaitan dengan kualitas deskripsi spasial dan konteks bentuk-bentuk yang membentuk ruang, yang dapat dibaca melalui pola, hierarki, dan hubungan spasial dengan ruang lain. Karena morfologi berfokus pada pembahasan morfologi geografis, maka morfologi harus dikaitkan dengan nilai spasial tertentu agar dapat memberikan makna pada representasi ruang. Nilai ruang dapat disebabkan oleh hierarki keruangan. Inilah pentingnya bagian fungsional, formal, dan simbolis. Sistem nilai spasial dapat diciptakan dalam berbagai ukuran atau ukuran, bentuk dan lokasi yang unik.

Menurut Tremlett, George (Adriana, 2007), prinsip morfologi dalam konteks lingkungan hidup yang menghubungkan proses pertumbuhan unsur-unsur fisik dengan unsur-unsur non-fisik yang mendasari morfologi spasial. Schultz (Widiangkoso, 2002) sendiri berpendapat, kajian morfologi pada dasarnya berkaitan dengan kualitas sosok dalam konteks bentuk kendala spasial. Sedangkan Schultz menyatakan bahwa sistem figuratif ruang dapat dihubungkan melalui pola, hierarki ruang, dan hubungan antara satu ruang dengan ruang lainnya.

Menurut A. Loeckx (Widiangkoso, 2002), studi morfologi adalah hubungan struktural antara jenis sambungan regulasi, hubungan, lokasi, dimensi, fungsi, dll yang mengatur berbagai jenis jaringan jalan ke dalam jaringan organisasi.

Menurut Mailes (Widiangkoso, 2002), kota memiliki tiga unsur morfologi: tata guna lahan, perencanaan/tata jalan, dan tipe bangunan.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan, secara garis besar terdapat beberapa kesamaan aspek, yaitu penggunaan lahan, jaringan jalan, dan bentuk bangunan. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dari perkotaan ditinjau dari tata guna lahan, pola-pola jalan, dan unsur tata bangunan berupa tipe-tipe bangunan.

2.6 Kesimpulan Kajian Pustaka

Perkembangan kota merupakan pertumbuhan suatu kawasan perkotaan yang terjadi ruang waktu yang berbeda namun menganalisis pada waktu yang sama. Perkembangan kota tidak lepas aspek keruangan itu sendiri serta faktor-faktor non fisik lainnya yang bersifat abstrak. Terdapat 2 faktor perkembangan kota yaitu faktor fisik yang mencakup tata guna lahan (*land use*) dan pola jalan (*street pattern*) serta faktor non fisik yang mencakup aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek politik.

Morfologi diartikan sebagai ilmu untuk mempelajari bentuk fisik secara logis. Sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam memahami perkembangan kota yang terus menerus mengalami perubahan, morfologi terdiri dari tiga unsur yaitu penggunaan lahan, jaringan jalan, dan bentuk bangunan.

Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan sebelumnya, maka teori yang digunakan sebagai dasar pengetahuan (*base of knowledge*) dirangkum pada **Tabel 2.1** sebagai berikut:

Tabel 2.1 Dasar Pengetahuan (Base of Knowledge)

Kelompok Teori	Sumber	Uraian Teori	Fokus Teori
Teori Perkembangan Kota	J.H.Goode (1996), Bintarto (1989), Branch (1995), Hudson (1991), Raharjo (2001), Markus Zahnd (2006), Purwanto (2001), Kostof (1991), Hillier (1999), Madanipour (1996)	Faktor-faktor fisik dan non-fisik yang mempengaruhi perkembangan kota meliputi: penggunaan lahan, jaringan jalan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik	Perkembangan Kota
Teori Morfologi	FDK Ching (2007), Tremlett, George (2007), Schultz (2002), A. Loeckx (2002), Mailes (2002)	Elemen-elemen morfologi meliputi: tata penggunaan lahan, jaringan jalan, dan bentuk bangunan	Morfologi

Berdasarkan **Tabel 2.1** mengenai dasar pengetahuan, dapat dilihat bahwa perkembangan kota dan morfologi memiliki aspek-aspek yang sama yaitu tata guna lahan, pola jalan atau jaringan jalan, dan bentuk bangunan. Berdasarkan ini, maka disusunlah variabel-variabel yang dijadikan fokus dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut disusun dalam **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Variabel penelitian

Fokus Teori	Variabel Penelitian
Teori Perkembangan Kota	Faktor-faktor perkembangan kota: <ul style="list-style-type: none">• Tata guna lahan• Pola Jaringan jalan• Aspek Ekonomi• Aspek Sosial• Aspek Politik
Teori Morfologi	Elemen-elemen morfologi: <ul style="list-style-type: none">• Penggunaan lahan• Jaringan jalan• Bentuk bangunan

2.7 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan pada penelitian ini. Penelitian yang dijadikan sebagai rujukan merupakan penelitian yang membahas baik morfologi maupun perkembangan perkotaan. Adapun penelitian-penelitian ini yaitu:

1. Chythia Putriyani Alie (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Perkembangan Perkotaan Terhadap Morfologi Kampung Kauman Kota Semarang”.
2. Irfanuddin Wahid Marzuki (2018) dengan judul penelitian “Perkembangan Morfologi Kota Gorontalo dari Masa Tradisional Hingga Kolonial”
3. Adhiya Harisanti F. (2013) dengan judul penelitian “Perkembangan Kawasan Cakranegara-Lombok”
4. Intan Dewi Sari (2020) dengan judul penelitian “Pola Perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat”
5. Elsa Martini (2011) dengan judul penelitian “Perkembangan Kota Menurut Parameter Kota Studi Kasus: Wilayah Jakarta Pusat”

Selain substansi dari penelitian sebelumnya, tata penulisan, serta struktur penelitian menjadi alat ukur penulis dalam memilih penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai rujukan penelitian ini. Informasi yang informatif terkait morfologi dan perkembangan kota pada rujukan-rujukan ini menjadi salah satu faktor utama dalam penyelesaian penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya yang dipilih sebagai rujukan pada penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Chythia Putriyani Alie (2013)	Pengaruh Perkembangan Perkotaan Terhadap Morfologi Kampung Kauman Kota Semarang	Analisis Deskriptif, Analisis Spasial	Perubahan fungsi lahan yang awalnya merupakan tempat tinggal atau hunian kini menjadi fungsi campuran di mana selain sebagai tempat hunian juga sebagai tempat usaha. Perubahan pola jalan terjadi pada daerah luar kampung Kauman yang mengikuti dengan pola perkembangan kota. Perubahan bentuk bangunan mengikut dengan perubahan fungsi lahan dimana bentuk bangunan yang awalnya hunian, kini menjadi tempat tinggal dan usaha (rumah toko)
2	Irfanuddin Wahid Marzuki (2018)	Perkembangan Morfologi Kota Gorontalo dari Masa Tradisional Hingga Kolonial	Penelitian ini menggunakan kajian arkeologi perkotaan, yaitu studi arkeologi yang mempelajari hubungan antara budaya material, tingkah laku, dan kegiatan manusia masa lalu dalam suatu kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi pusat kota bergerak dari pedalaman menuju arah pantai. • Lokasi pusat kota yang jauh dari laut dan berdekatan dengan sungai didasari oleh faktor keamanan dan transportasi. • Perpindahan pusat kota ke arah pantai didasari oleh kondisi yang semakin aman dan lahan yang datar. • Bentuk morfologi kota yang awalnya berbentuk kotak-kotak (<i>grid</i>), berubah menjadi bentuk kipas pada masa kolonial dikarenakan kondisi geografis Gorontalo yang terletak dalam sebuah teluk.

3	Adhiya Harisanti F. (2013)	Perkembangan Kawasan Cakranegara- Lombok	Analisis Faktor dan analisis sinkronik-dikronik	Faktor yang mempengaruhi perkembangan Kawasan Cakranegara, yaitu kearifan lokal, sosial budaya masyarakat, perkembangan zaman, dan upaya pelestarian. Perkembangan paling pesat terjadi mulai tahun 1970 sampai 2013. Perkembangan bangunan dan lingkungan paling pesat terjadi di sepanjang jalan utama yang mayoritas berkembang menjadi fungsi perdagangan dan permukiman.
4	Intan Dewi Sari (2020)	Pola Perkembangan Kawasan Perkotaan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Analisis proses dan makna (perspektif subjek)	Pola persebaran permukiman di Kabupaten Maluku Tenggara barat dari aspek bentuk persebaran kelompok permukiman membentuk pola persebaran kelompok permukiman memanjang, dan pola persebaran kelompok permukiman sejajar. Bentuk kota mengarah ke pola yang memanjang dan perkembangan yang meloncat yang mengikuti daerah pesisir. Kecenderungan struktur kota pada masa kini ditentukan oleh perkembangan jaringan jalan yang mempengaruhi komponen pembentuk koya dan diikuti oleh tumbuhnya permukiman baru yang menciptakan pusat-pusat lingkungan baru

5	Elsa Martini (2011)	Perkembangan Kota Menurut Parameter Kota Studi Kasus : Wilayah Jakarta Pusat	Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pengujian teori perkembangan perkotaan	Perkembangan Kotamadya Jakarta Pusat umumnya DKI Jakarta tidak lepas dari pertumbuhan wilayah, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun perkembangan ruang. Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kota. kebutuhan akan sarana dan prasarana serta lahan tinggal yang juga meningkat membuat perkembangan menjadi pesat. Kotamadya Jakarta Pusat berkembang secara vertikal dan interstisial demi mencukupi kebutuhan-kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan politik.
---	------------------------	---	---	---

Sumber: Chythia Putriyani Alie, 2013; Irfanuddin Wahid Marzuki, 2018; Adhiya Harisanti F., 2013; Intan Dewi Sari, 2020; Elsa Martini, 2011